

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan sosok yang sadar akan dirinya dan menyadari keberadaan sesuatu di luar dirinya. Kesadaran inilah yang membuat dirinya memiliki potensi untuk bernilai (*meaning*) (Hakam & Nurdin, 2016). Sebagai sosok yang menyadari keberadaan lingkungan di luar dirinya, manusia memiliki potensi untuk menangkap nilai, atau menghadirkan nilai dalam dirinya, bahkan menjadikan nilai tersebut menjadi nilai dirinya. Dilain pihak, sebagai sosok yang menyadari eksistensinya, manusia memiliki kemampuan untuk meningkatkan derajat kebernilaian dirinya. Kedua potensi ini (proses *meaning*) dilakukan oleh manusia dengan memberdayakan akal dan rasanya. Dengan keduanya, manusia memiliki kemampuan untuk memikirkan sesuatu dan menghayatinya secara mendalam dan melahirkannya dalam bentuk sesuatu yang baru (Sauri, 2021).

Proses seseorang menghadirkan, menangkap, bahkan mengintegrasikan suatu nilai menjadi nilai dirinya itulah yang dimaksud dengan internalisasi nilai (Bali & Susilowati, 2019). Proses internalisasi nilai yang terjadi dalam diri manusia merupakan proses yang sangat panjang dan unik. Karena proses tersebut tidak terjadi secara instan dan prosesnya baik secara kualitatif atau kuantitatif berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainya. Karena itu, sangat wajar ketika Phenix (1964) menganggap proses *meaning* sebagai hakikat manusia. Beliau memandang manusia merupakan sosok yang mampu menemukan (*discover*), menciptakan (*create*), dan mengekspresikan (*express*) *meaning* (pengertian) atau makhluk yang memiliki kesadaran nilai (Mulyana, 2011).

Secara konseptual, banyak pakar pendidikan nilai yang berusaha menggambarkan tahapan atau proses internalisasi yang dialami manusia, salah satunya adalah Kama (2016). Menurutnya, proses internalisasi nilai dari diri manusia terjadi dalam tujuh tahapan kontinum yang terus berkembang seiring dengan waktu dan pengalamannya, yaitu: *information*, *belief*, *attitude*, *value*, *character*, *personality*, dan *dignity*. Tahap pertama (*information*) internalisasi nilai

terjadi saat seseorang menerima informasi tentang suatu nilai. Ketika informasi tentang nilai itu diyakini maka tahap kedua telah tercapai (*belief*). Sementara tahap ketiga (*attitude*) bisa dipenuhi saat seseorang melakukan nilai yang telah diyakini tersebut. Sementara itu, tahap keempat (*value*) internalisasi nilai diperoleh saat seseorang mampu menjadikan nilai tersebut menjadi nilai dirinya. Kemudian, kondisi saat nilai diri tersebut menjadi prinsip diri dan melembaga, maka tahap kelima (*character*) terpenuhi. Selanjutnya, tahap keenam (*character*) diraih ketika suatu nilai menjadi pembeda dirinya dengan yang lain dan ketika nilai tersebut menjadi jati dirinya, maka level tertinggi proses internalisasi nilai (*dignity*) tercapai. Ketujuh tahapan internalisasi nilai tersebut merupakan buah dari proses penginternalisasian nilai.

Sekaitan dengan potensi manusia tersebut, maka tujuan utama pendidikan sebagai upaya untuk memanusiakan manusia adalah mendidik manusia untuk menjadi baik (*good*) disamping menjadikannya cerdas (*smart*) (Lickona, 1992). Dalam mendidik manusia untuk menjadi baik, pendidikan harus mampu mendorong pertumbuhan *meaning* dalam diri peserta didik (Phenix, 1964). Karena ini, tugas utama pendidikan adalah memperkuat dasar bagi nilai-nilai atau menanamkan nilai (Tafsir, 2006), karena nilai tidak bisa dipisahkan dari pendidikan (Sauri, Saepulloh, & Sanusi, 2021).

Dalam konteks pendidikan, salah satu strategi yang bisa digunakan untuk proses penginternalisasian nilai adalah strategi transinternalisasi nilai (Muhaimin, 2008). Dalam strategi ini, proses penginternalisasian nilai dilakukan melalui tiga tahapan proses, yaitu: (1) transinformasi nilai, (2) transaksi nilai, dan (3) transinternalisasi nilai (Bali & Susilowati, 2019). Pada tahap pertama proses internalisasi nilai baru menyentuh ranah kognitif, karena nilai baru disampaikan dalam bentuk komunikasi verbal oleh pendidik ke peserta didik. Sementara itu, tahap kedua proses internalisasi nilai dilakukan melalui komunikasi dua arah antara pendidik dan peserta didik. Pada tahap ini pendidik memberikan contoh nilai yang dijalankannya, sementara peserta didik dapat menerima nilai baru yang disesuaikan dengan nilai dirinya. Kemudian pada tahap ketiga (transinternalisasi nilai), proses

internalisasi nilai dilakukan bukan hanya melalui komunikasi verbal tapi komunikasi kepribadian melalui keteladanan, pengkondisian, pembiasaan, bahkan pembudayaan.

Namun demikian, sangat disayangkan penyelenggaraan pendidikan dewasa ini justru terkesan abai dengan persoalan-persoalan nilai (Mawardi, 2011). Terkait hal ini, Brooks (2020) menjelaskan bahwa dunia pendidikan kita lebih fokus pada *resume virtue*, atau sisi manusia yang berorientasi pada karier dan hampir melupakan *eulogy virtue*, yaitu sisi manusia yang berorientasi pada nilai-nilai. Dengan pendidikan yang lebih fokus pada pengembangan aspek kognitif tersebut, maka proses penginternalisasian nilai-nilai hampir tidak terjadi. Karena itu sangat masuk di akal ketika Lickona (1992) menyebutkan telah terjadi gejala-gejala kemerosotan moral pada diri generasi muda. Menurut beliau, demoralisasi di kalangan remaja bisa diatasi dengan menginternalisasikan dua nilai moral dasar, yaitu sikap hormat (salah satu bentuknya adalah toleransi) dan bertanggung jawab. Dua nilai moral dasar ini sangat penting salah satunya untuk menjaga hubungan interpersonal dalam rangka memelihara kerukunan, perdamaian, dan keamanan internasional.

Memelihara kerukunan, perdamaian dan keamanan internasional, merupakan keniscayaan bagi setiap negara. Bagi negara yang memiliki masyarakat homogen memelihara kerukunan, perdamaian dan keamanan relatif mudah untuk diwujudkan. Akan tetapi, bagi negara dengan masyarakat heterogen, seperti Indonesia, hal tersebut menjadi sedikit lebih rumit. Namun demikian, kerukunan, perdamaian dan keamanan akan mudah terwujud dalam masyarakat yang toleran. Toleransi adalah kunci untuk meraih harmoni sosial di dalam masyarakat yang majemuk, termasuk multi-agama.

Toleransi secara sederhana dalam kamus besar Bahasa Indonesia menunjukkan arti sifat atau sikap toleran dan menoleransi berarti mendiamkan atau membiarkan. Dengan kata lain, toleransi bermula dari penghormatan terhadap hak-hak orang lain (Turebayeva, Doszhanova, Orazova, & Zhubatyrova, 2013, hal. 39). Dengan berpijak pada makna dasar tersebut, dalam konteks beragama, toleransi

berarti sifat atau sikap membiarkan beragama atau menghormati hak orang lain untuk beragama. Sekaitan dengan hal tersebut, secara historis istilah 'toleransi beragama' pada awalnya muncul karena ketidakmampuan seseorang untuk memiliki pandangan yang sama tentang agama yang para perkembangan selanjutnya, istilah tersebut merujuk kepada makna kebebasan untuk beragama (Hunt, 2011, hal. 4). Namun demikian, untuk konteks saat ini toleransi beragama dimaknai bukan sebatas pada kebebasan untuk beragama atau menghormati hak orang lain untuk beragama, tapi lebih jauh pada upaya untuk memahami perbedaan tersebut (Shea, 1987, hal. 11).

Pentingnya menanamkan nilai-nilai toleransi, termasuk toleransi beragama, sudah sejak lama menjadi perhatian dunia internasional di tengah kondisi warga dunia yang makin heterogen. *Faktanya* saat ini, kemajuan di bidang teknologi transportasi yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tidak ada lagi bangsa yang homogen di dunia ini. Karenanya penanaman nilai toleransi menjadi satu tuntutan. Bahkan, Wiliam James (Ismail, 2012, hal. 6; James, 2014) menyatakan bahwa cinta dan harmoni merupakan salah satu kriteria orang yang matang dalam beragama, dimana toleransi merupakan salah satu wujud harmoni tersebut. Lebih jauh, Turebayeva (2013, hal. 39) berpendapat bahwa toleransi, sebagai suatu ukuran dari kualitas seseorang, merupakan perpaduan antara pengetahuan (*cognitive*), perilaku (*behavioral*) dan sikap (*emotional-evaluative*) bertoleransi. Sekaitan dengan hal tersebut, tindakan toleransi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk tidak mengganggu orang yang berbeda dengannya (di tengah keberagaman) (Cohen A. J., 2004, hal. 69), dimana pada saat yang sama orang tersebut sebenarnya mampu untuk melakukan intervensi.

Lebih jauh beberapa penelitian mengungkap tentang pentingnya menumbuhkan sikap toleransi, termasuk di kalangan civitas akademika di perguruan tinggi, tidak terkecuali mahasiswa. Salah satunya, penelitian yang dilakukan oleh Sedini (2009, hal. 3) tentang tiga ukuran untuk mengetahui tingkat keunggulan atau kualitas suatu perguruan tinggi di salah satu propinsi di Canada,

yaitu Ontario. Salah satu ukuran yang dia gunakan untuk mengukur kualitas suatu perguruan tinggi adalah iklim toleransi yang ada di perguruan tinggi tersebut di samping kualitas sumber daya dan penguasaan TIK. Dia berargumentasi bahwa semakin toleran suatu perguruan tinggi (meliputi seluruh civitas akademiknya) semakin punya peluang perguruan tinggi tersebut untuk berkualitas.

Namun demikian, beberapa pakar menyatakan bahwa toleransi itu memiliki 'keterbatasan'. Mereka menyebut keterbatasan tersebut dengan istilah '*the limits of tolerance*'. Bahkan limabelas tahun terakhir banyak penelitian dilakukan tentang hal tersebut. *Human Right Watch* pada tahun 1998, menerbitkan laporan penelitian yang dilakukan di Chili tentang *the limits of tolerance* yang dialami oleh warga Chile dalam hal kebebasan berekspresi dan debat publik. Mereka mengungkap tentang lemahnya perlindungan konstitusi di Chili tentang kebebasan berekspresi warganya (Human Right Watch, 1998, hal. 40). Lebih jauh Zomeren, Fischer dan Spears (2007, hal. 1), dalam risetnya yang dipublikasikan di bulletin *Personality and Social Psychology*, membuktikan adanya *the limits of tolerance* dengan mengukur 'kecemasan' antar kelompok (*intergroup anxiety*) yaitu berupa kecenderungan ada perasaan cemas atau khawatir ketika seseorang berinteraksi dengan anggota di luar kelompoknya. Hasil riset tersebut menunjukkan bagaimana *intergroup anxiety* memiliki kecenderungan untuk memperkuat respon negatif dan respon kekerasan ketika terjadi kontak dengan luar grup. Karenanya tidak salah ketika Hermann Broch, sebagaimana yang dikutip Berger (2008, hal. 245), bahwa '*tolerance is intolerant and demands assimilation*' toleransi pada hakikatnya adalah intoleransi (terhadap beberapa hal) dan toleransi hanya akan terjadi ketika dua atau beberapa kelompok yang berlainan menerima perbedaan masing-masing dan saling berasimilasi.

Selanjutnya dalam *British Journal of Political Science*, Petersen, Slothuus, Stubager dan Togeby (2010, hal. 584) menyatakan bahwa salah satu bentuk toleransi, contohnya toleransi dalam berpolitik (*political tolerance*) dibatasi oleh 'sesuatu' yang mereka namakan *considerations of reciprocity* (satu pertimbangan yang saling menguntungkan dan disepakati oleh kedua belah pihak). Dalam

kesimpulan risetnya perilaku toleran akan cenderung tumbuh kuat dalam batas (*considerations of reciprocity*) pada kelompok yang menegakkan hak-hak warga untuk berdemokrasi walaupun kelompok tersebut ditakuti (*least-liked* atau *feared*). Riset-riset tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa lingkup toleransi itu dibatasi oleh beberapa hal, diantaranya: 'kecenderungan' dari konstitusi yang berlaku, *intergroup anxiety* (perasaan cemas ketika berinteraksi dengan anggota luar kelompok, dan *considerations of reciprocity* (pertimbangan logis yang saling menguntungkan) di suatu komunitas.

Terlepas dari ambiguitas makna toleransi, dalam konteks Indonesia, sebagai bangsa yang *multi-religion* berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa dan muslim sebagai mayoritas di dunia (dengan ragam pemahaman ke-Islaman dalam konteks fiqih), agama sejatinya merupakan sumber gagasan perdamaian (Lubis, 2017). Karenanya, penanaman nilai-nilai toleransi merupakan suatu keniscayaan dan bisa dilakukan, salah satunya, melalui perkuliahan Pendidikan Agama Islam (selanjutnya disingkat PAI) di tingkat pendidikan tinggi. Karenanya, pemerintah memasukkan mata kuliah agama sebagai mata kuliah wajib kurikulum pendidikan tinggi.

Pemerintah memposisikan pendidikan agama sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum di pendidikan tinggi karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, konstitusi mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional diarahkan pada pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan IMTAQ dan akhlak mulia (UUD 1945). Salah satu wujud realisasi dari amanat tersebut adalah penyelenggaraan pendidikan agama dalam bentuk kurikulum wajib persekolahan serta mata kuliah wajib dalam kurikulum di pendidikan tinggi (UUSPN No. 20 tahun 2003 dan UUPT No. 12 Tahun 2012)

Terkait hal ini, UUSPN No. 20 tahun 2003 menjamin hak siswa untuk mendapatkan pendidikan agama yang dianutnya. Disamping itu, sebagai kurikulum wajib di level sekolah sampai pendidikan tinggi, selain pendidikan kewarganeraan dan bahasa, agama wajib diajarkan oleh pendidikan yang seagama. Karenanya, pemerintah menjamin ketersediaan guru agama pada setiap jenjang pendidikan.

Dengan kata lain, pemerintah Indonesia menganggap bahwa pendidikan agama dan etika itu penting (Brodjonegoro, 1999, hal. 11) dan strategis (Soebahar, 2002, hal. 149), sehingga setiap warga negara Indonesia yang bersekolah, dimanapun juga, dijamin mendapatkan pendidikan agama.

Kedua, Sikap Spiritual dan Sikap Sosial sebagai wilayah kerja PAI merupakan bagian dari Tujuan Pendidikan Nasional disamping dimensi pengetahuan dan keterampilan. Sikap spiritual dalam tujuan pendidikan nasional diwakili oleh IMTAQ, sementara sikap sosial mencakup sifat-sifat yang diperlukan untuk menjadi warga Negara yang baik, seperti berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, pribadi yang mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Sementara dimensi pengetahuan diwakili oleh berilmu, dan dimensi keterampilan diwakili oleh sifat cakap dan kreatif. (UUSPN No. 20). Penjabaran kedelapan karakter tujuan pendidikan nasional beserta keempat dimensinya bisa dilihat dalam tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Dimensi Tujuan Pendidikan Nasional

Dimensi	Tujuan Pendidikan
Dimensi Spiritual	Peningkata iman dan taqwa siswa
Dimensi Sosial	Peningkatan akhlak mulia atau moral, kesehatan jasmani dan rohani, kemandirian, dan demokratis serta bertanggung jawab
Dimensi Pengetahuan	Peningkatan pengetahuan
Dimensi Keterampilan	Peningkatan kecakapan dan kreatifitas

Rumusan tujuan pendidikan di atas, menegaskan bahwa hakikat pendidikan dalam budaya Indonesia adalah memperkuat dasar bagi nilai-nilai. Dengan demikian, tugas utama pendidikan yang paling utama adalah menanamkan nilai-nilai (Tafsir, 2006, hal. 49), yang dalam konteks Indonesia delapan karakter sebagaimana dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional.

Ketiga, Rumusan tujuan pendidikan tinggi yang memperkuat tujuan pendidikan nasional dalam hal peningkatan IMTAQ, perilaku mulia, kesehatan

jasmani dan rohani, berilmu, kecakapan, kreativitas, kemandirian, keterampilan, kompetensi, dan berbudaya. Sehubungan dengan tujuan tersebut, mata kuliah pendidikan agama berperan dalam mengembangkan dua potensi dasar mahasiswa yaitu peningkatan IMTAQ dan perilaku mulia (UUPT No.12).

Sekaitan dengan tujuan diatas, dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia, pendidikan agama harus mensinergikan pendidikan dalam konteks pengetahuan dan pembinaan kepribadian. Artinya, pengetahuan agama yang diajarkan pada mata kuliah agama harus mewujudkan pada kepribadian mahasiswa bahkan sampai pada pembiasaan berperilaku baik (Ainiyah, 2013), salah satunya moderasi (Purwanto, Qowaid, Ma'rifataini, & Fauzi, 2019a). Pada level lanjut mahasiswa akan mampu mengembangkan *religious reasoning* (Afdal, 2014) atau penalaran agamanya (Vermeer, 2012). Dengan demikian, agama tidak lagi sebatas doktriner sepihak tapi kebermanfaatannya dirasakan secara langsung oleh siswa. Inilah yang dimaksud oleh Grimmit (1987) dengan pendidikan agama dalam konteks *learning from religion* (Teece, 2010; 2010).

Peran pendidikan agama, sebagai garda terdepan dalam pembinaan IMTAQ dan perilaku mulia, harus mampu memanfaatkan peluang positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan meminimalisir dampak negatifnya (Syarief, 1999). Pendidikan agama mendorong setiap muslim memiliki otonomi dalam setiap perilakunya dan tidak dikontrol oleh kemajuan zaman. Dalam teori psikologi kemampuan seseorang dalam mengontrol perilakunya secara otonom disebut dengan *self-determined* (Deci & Ryan, 2001). Dengan demikian pada gilirannya pendidikan agama berkontribusi atas lahirnya cendekiawan-cendekiawan muslim yang kokoh imanya, baik akhlaknya, dan mandalam ilmunya, serta pengembang teknologi.

IMTAK dan IPTEK bagi seorang muslim ibarat dua sisi mata uang. Rasa tanggung jawab dunia dan akhirat dalam diri seorang cendekiawan muslim lahir berkat keseimbangan diantara keduanya. (Amal, 1999, hal. 57). Dengan sentuhan agama, kebermanfaatannya kemajuan IPTEK akan semakin terasa, dan dengan sentuhan kemajuan IPTEK agama semakin membumi karena mudah dipahami dan

dekat dengan kehidupan manusia. Bahkan belajar agama menjadi lebih menyenangkan (Hanafi, Murtadho, Ikhsan, & Diyana, 2020; Hanafi, Murtadho, Ikhsan, Diyana, & Sultoni, 2019). Einstein menekankan pentingnya ilmu dan agama karena satu sama lain saling melengkapi dan berasal dari sumber yang sama.

Sehubungan dengan hal tersebut, pendidikan agama di perguruan tinggi memerlukan formula yang tepat untuk merumuskan strategi belajar dan mengajar dalam rangka pengembangan akhlak mulia yang mencerminkan keseimbangan perilaku kekhalifahan dan kehambaan. Salah satu akhlak mulia yang perlu diinternalisasikan melalui mata kuliah agama, sekaitan dengan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang *multi-ethnic*, *multi culture*, dan *multi-religion*, adalah toleransi atau *tasamuh* (dalam literatur agama Islam). Sikap tersebut, pada gilirannya, akan melahirkan muslim yang berkarakter moderat (Purwanto, Durachan, Syaifei, Suprpto, & Hidayatullah, 2021a). Nilai toleran merupakan salah satu karakter dari 18 karakter yang dirumuskan oleh kementerian pendidikan nasional (Aulia, et al., 2020).

Bagi seorang muslim berjiwa toleran baik dalam bersikap maupun berpikir, merupakan salah satu ciri moderatisme. Seseorang yang berjiwa toleran memiliki kecenderungan berada di titik tengah, tidak condong ke kiri atau pun ke kanan. Walaupun ada di titik tengah, bukan berarti diam, tapi justru aktif bergerak (Shihab, 2019). Sebagai sikap keberagaman, seorang muslim yang toleran dalam konteks moderat merupakan seorang muslim yang memiliki sikap diantara eksklusif dan pluralis. Dalam bahasa lain, kemoderatan seorang muslim bias teramati dari sikap pertengahan yang bersangkutan dalam beragama (Az-Zuhaili, 2005, hal. 193). Karenanya, sifat kemoderatan yang melekat pada seorang muslim akan membuatnya terhindar dari sikap berlebih-lebihan dalam beragama, serta fanatisme buta. Namun demikian, ia merupakan sosok muslim yang berpegang teguh kepada hukum-hukum agama dan konsisten dalam menjalankannya.

Disamping dalam bersikap, moderasi juga ditunjukkan lewat keterbukaan pikiran (*openness*). Membuka pikiran bukan berarti merubah pikirannya atau menyetujui pikiran lain yang berbeda dengannya (Schwartz S. , 2008). Keterbukaan

pikiran menunjukkan pribadi yang memiliki wawasan luas dan kesadaran mendalam bahwa perbedaan dalam segala bentuknya tidak bisa dihindarkan, apalagi sekedar perbedaan (*ikhtilâf*) dalam hasil ijtihad. Perbedaan (*khilafiyah*) dalam Islam merupakan suatu keniscayaan. Namun, perbedaan tersebut tidak dijadikan sebagai sumber konflik melainkan merupakan kekayaan khazanah keilmuan Islam (Shihab, 2020). Jangan kan untuk seorang muslim, sejatinya kehadiran Islam didasari dengan spirit jaminan sosial, stabilisasi, perdamaian, dan persaudaraan untuk seluruh manusia (Syu'aibi & Kibil, 2004, hal. 251).

Berdasarkan uraian di atas, mengingat sangat penting dan strategisnya pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional, khususnya di perguruan tinggi, semua pihak terutama dari para pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah dan para pimpinan lembaga pendidikan, dan para praktisi pendidikan, yaitu guru dan dosen sudah saatnya memberikan perhatian yang serius. Posisi strategis tersebut mengharuskan adanya usaha yang sungguh-sungguh dan maksimal dari semua pihak (Rahim, 2001, hal. 38-39) untuk memberikan pendidikan agama yang lebih berorientasi pada kebutuhan mahasiswa untuk mengembangkan potensi beragamanya. Setidaknya beberapa ahli menamakan potensi itu sebagai, *religious experience* (Court, 2013), *religious reasoning* (Vermeer, 2012), bahkan sampai otonomi belajar (Xhaferi & Xhaferi, 2011), termasuk dalam belajar agama di level pendidikan tinggi.

Tujuan-tujuan tersebut hanya akan tercapai bila pendidikan agama disampaikan dengan metodologi yang benar. Hal itu dikarenakan, kesalahan pemahaman Islam yang berdamak pada munculnya radikalisme, disebabkan menggunakan metode yang salah dalam memahami Islam. *Namun demikian*, banyak orang meragukan keberhasilan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan agama di Indonesia. Salah satunya dalam proses menanamkan nilai toleransi kepada mahasiswa di tengah kondisi bangsa Indonesia yang *multi-religion*. Bahkan menurut ICRP (*Indonesian Conference on Religion and Peace*) dalam konteks Indonesia, Agama masih menjadi alat pemicu konflik dan belum menjadi media pencipta kedamaian (Azizah, 2013). Dilain pihak, pembelajaran PAI

di Perguruan Tinggi Umum (selanjutnya disebut PTU) dalam hal menanamkan toleransi internal di antara umat Islam terkait perbedaan ijthad masih belum menemukan metodologi yang tepat.

Parker (2010, hal. 1) menyampaikan hasil penelitiannya tentang *toleransi beragama dan pendidikan lintas-agama di Indonesia*. Menurutnya pada era Soeharto pendidikan agama berhasil menanamkan nilai toleransi. Setiap warga negara Indonesia, saat itu sangat menyadari arti penting dari motto Bhineka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*). Namun setelah era Soeharto, menurutnya penanaman kesadaran tersebut menjadi cenderung turun. Namun, banyak tokoh seperti Franz Magnis Soeseno, dan Niels Mulder yang menyatakan bahwa pada era Soeharto pun toleransi sebetulnya tidak nampak, karena yang terjadi adalah indoktrinasi agar setiap warganegara “menghindari konflik” karena masa Soeharto menekankan *forced-social cohesion* guna memudahkan pengontrolan terhadap warganegara (Kalidjernih, 2005).

Lebih jauh, ketidakmaksimalan pendidikan agama dalam menanamkan nilai toleransi, bisa diidentifikasi dari beberapa hal. *Pertama*, kebanyakan mahasiswa para aktivis keagamaan di kampus cenderung memiliki corak berpikir eksklusif bahkan mengarah pada intoleransi. Salah satu ciri dari corak berpikir eksklusif adalah memahami secara tekstual terhadap ayat-ayat Alquran yang berbicara hukum pidana, terutama terkait penerapannya dalam konteks hukum positif.

Pendapat lain, menyajikan beberapa indikasi ketidakberhasilan pendidikan agama di Indonesia. Hal-hal yang dimaksud menurut Hurni Rahim (2001, hal. 37) adalah: (1) 12 tahun belajar agama Islam di sekolah belum mampu menuntaskan buta aksara Alquran di kalangan mahasiswa, pelaksanaan shalat belum disiplin, meninggalkan kewajiban berpuasa, dan kecenderungan mahasiswa untuk bersikap intoleransi, fanatisme golongan dan bahkan radikalisme (Saifuddin, 2011); (2), masih terjadi tawuran di kalangan mahasiswa yang tidak jarang memakan korban jiwa, pelanggaran susila (seks bebas), obat terlarang dan minuman keras, dan (3) lemahnya kendali akhlak dalam diri seseorang. Walaupun demikian, pernyataan Husni Rahim di atas perlu dikritisi dan dikaji lebih jauh karena bisa jadi yang

menyebabkan para siswa tawuran atau kenakalan remaja lainnya dan juga budaya korup bukan disebabkan oleh ketidakberhasilan pendidikan agama tapi karena factor lain yang sangat kompleks.

Kedua, agama baru disampaikan secara kognitif. Kebanyakan dosen agama mengajarkan agama dengan metode ceramah yang memperlakukan mahasiswa secara pasif dan sebatas mendengar (Nasution H. , 1996, hal. 385). Sehingga yang diperoleh mahasiswa baru sebatas informasi atau pengetahuan tentang agama. Hal ini dikarenakan pembelajaran PAI di kebanyakan perguruan tinggi belum menyentuh aspek sikap atau perilaku beragama, salah di antaranya adalah toleransi. Padahal, pendidikan agama yang sangat diperlukan di perguruan tinggi lebih dari sekedar pengajaran agama, yaitu memperkuat dasar bagi nilai-nilai (Tafsir, 2006). Sehingga dengan demikian pendidikan agama menjadi lebih bermakna.

Namun sangat disayangkan, dalam pelaksanaannya hal tersebut masih memiliki kendala. Beberapa dosen sulit meninggalkan zona nyaman yang sudah secara ruti dilakukan dan tepat pada pendekatan pengajaran agama secara kognitif. Sehingga yang dihasilkan perguruan tinggi kita adalah lulusan-lulusan mahasiswa yang berpengetahuan agama bukan berjiwa agama. Inilah yang menjadi salah satu sebab 'gagalnya' pendidikan agama dan suburnya sikap fanatisme buta dan sikap intoleransi pada kalangan mahasiswa.

Ada dua klasifikasi toleransi yang perlu ditanamkan dalam pendidikan agama, yaitu toleransi intern umat beragama, seperti antara sesama muslim, antara sesama umat Kristen, dll., dan toleransi antar umat beragama, seperti antara muslim dan non muslim. Pada prinsipnya toleransi beragama adalah penyadaran akan adanya realitas perbedaan di dalam agama itu sendiri maupun antara agama yang satu dengan yang lainnya. Penyadaran akan adanya keragaman dalam beragama tersebut perlu ditanamkan dalam diri mahasiswa agar mereka berwawasan, bersikap dan berperilaku toleran dalam beragama. Intinya toleransi itu adalah '*respect for diversity*' (menghargai perbedaan) sebagaimana yang ditulis oleh Giacomo Corneo dan Olivier Jeane (2009) dalam tulisannya *A Theory of Tolerance*.

Untuk mewujudkan pendidikan agama (termasuk PAI) di perguruan tinggi yang tepat dan benar di atas yang mampu membentuk mahasiswa yang toleran, setidaknya ada beberapa aspek yang perlu dibenahi, yaitu (1) redefinisi PAI dalam konteks Pendidikan Umum dan Karakter atau dalam kerangka Mata Kuliah Dasar Umum, (2) kualifikasi SDM dosen-dosen agama, (3) kurikulum PAI di Perguruan Tinggi dan (4) metode perkuliahan agama.

Berbicara tentang pendidikan agama, secara khusus PAI, selama ini sering dipahami secara keliru karena PAI dipahami hanya sebatas pengajaran materi agama yang bersifat doktriner dan/atau terkadang dipahami sebatas simbol-simbol agama dalam aspek ritual. Pendidikan agama harusnya dipahami tidak sesempit itu. PAI harus diarahkan pada upaya pengembangan seluruh potensi peserta didik menuju kesempurnaannya sebagai manusia (Al-Nahlawi, 2011). Salah satu potensi yang penting dikembangkan terkait pendidikan agama adalah potensi bernilai, baik menghadirkan nilai dalam dirinya ataupun meningkatkan derajat kebernilaian dirinya (Hakam & Nurdin, 2016). PAI diselenggarakan dengan mengusung moderatisme dan mempromosikan nilai-nilai universal serta hadis sebagai sumber perdamaian (Lubis, 2017). Dengan demikian toleransi merupakan salah satu ruh dari PAI. Itulah PAI dalam kacamata Pendidikan Umum dan Karakter atau dalam kerangka Mata Kuliah Wajib Umum.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah *dosen-dosen agama*. Dosen-dosen agama memerankan peranan penting dalam keberhasilan pendidikan agama di perguruan tinggi. Dosen agama, berikut keanekaragaman pemahaman mereka terhadap teks agama, berpengaruh pada penyampaian pendidikan agama di perguruan tinggi. Azra (Muhaimin, Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam, 2009, hal. 56-57), seorang pemikir muslim di Indonesia dan pemerhati timur tengah, mengungkapkan hasil analisisnya tentang keragaman pemahaman dan penafsiran teks agama yang pada gilirannya akan memunculkan pola-pola artikulasi keberagaman yang akan mempengaruhi pola pendidikan agama yang dilakukan dosen agama di kelas. Beliau mengelompokkan artikulasi kedalam tiga tipologi, yaitu: *Substansialisme*, *Formalisme*, dan *Spiritualisme*.

Substansialisme lebih mementingkan agama dari sisi substansi/isi dari pada simbol-simbol eksplisit. *Formalisme* merupakan kebalikannya, lebih cenderung sangat literal, dan/atau ketaatan formal dimana hukum agama diekspresikan dalam bentuk sangat lahiriah semacam simbol keagamaan. Sementara *spiritualisme* lebih menekankan pada pengembangan sikap bathiniah, melalui keikutsertaan dalam kelompok-kelompok *spiritual-mistik*, tasawuf/tarekat, bahkan kelompok kultus. Namun demikian, sebagaimana diakui pula oleh Azra, kenyataan di lapangan tidak ada batasan ketat antara tipologi tersebut, bahkan cenderung *overlapping* (tumpang tindih).

Berikutnya adalah *kulikulum PAI di PTU*. Isu utama terkait hal ini adalah perlunya standarisasi kurikulum PAI pada PTU. Rujukan standarisasi dari kurikulum pendidikan agama adalah tujuan dari pendidikan nasional terutama pengembangan aspek dimensi spiritual dan dimensi sosial sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya dalam rangka menanamkan nilai toleransi untuk mewujudkan harmoni sosial di masyarakat yang multi agama seperti Indonesia.

Yang tidak kalah penting dari redefinisi PAI, dosen agama, dan kurikulum adalah *pengembangan metode-metode perkuliahan agama*. Keterampilan memilih, menggunakan, dan mengembangkan metode pembelajaran (perkuliahan) adalah salah satu wujud profesionalisme seorang dosen, termasuk dosen agama. Kurikulum agama yang sudah dirancang sedemikian rupa akan kehilangan ruhnya ketika dosen agama tidak terampil dalam memilih dan menggunakan metode perkuliahan. Materi ajar yang sama akan menghasilkan dampak yang berbeda ketika disampaikan dengan metode yang berbeda. Untuk menanamkan wawasan, sikap dan perilaku toleran dalam beragama, dosen agama perlu memiliki keterampilan dalam memilih dan menggunakan bahkan mengembangkan metode perkuliahan agama.

Singkatnya, pengembangan mata kuliah PAI di PTU harus lebih mulai lebih diorientasikan pada upaya membelajarkan dan membudayakan nilai-nilai. Terkait tujuan pendidikan nasional, yang dimaksud dengan nilai-nilai tersebut adalah aspek spiritual dan sosial. Tentunya tanpa mengabaikan pencapaian dua aspek lainnya,

yaitu pengetahuan dan keterampilan. Tujuan pendidikan nasional tersebut mengarah pada formulasi perkuliahan agama yang mampu menanamkan wawasan, sikap dan perilaku toleran dalam beragama kepada mahasiswa. Inti dari toleransi adalah kesiapan menerima realitas adanya perbedaan. Ketika mahasiswa menyadari bahwa perbedaan itu merupakan sebuah realitas, maka mereka akan cenderung bersikap respek terhadap setiap bentuk perbedaan dan tidak akan pernah merasa terganggu dengan perbedaan tersebut. Perdamaian dan keamanan akan terwujud ketika toleransi sudah tercipta. Pada gilirannya, ketika nilai toleransi sudah terinternalisasi, akan melahirkan masyarakat yang memiliki sikap moderat. Melalui perkuliahan agama, salah satunya, kiranya hal tersebut bisa diwujudkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji realita internalisasi nilai toleransi melalui mata kuliah PAI di Universitas Pendidikan Indonesia (selanjutnya disebut UPI), untuk selanjutnya menjadi bahan dasar untuk mengembangkan model hipotetik internalisasi nilai toleransi melalui mata kuliah PAI di PTU secara konseptual untuk selanjutnya dilakukan uji coba terbatas. Sekaitan dengan hal tersebut, peneliti mengemasnya dalam bentuk judul "Internalisasi Nilai Toleransi melalui Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum sebagai Upaya Membentuk Mahasiswa Muslim Moderat (Studi Pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018-2021)"

1.2 Rumusan Permasalahan Penelitian

Rumusan masalah utama dalam riset ini adalah : "Bagaimanakah proses internalisasi nilai toleransi melalui mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum sebagai Upaya untuk Membentuk Mahasiswa Muslim Moderat?". Pertanyaan pokok tersebut kemudian dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana realitas internalisasi nilai toleransi melalui perkuliahan Pendidikan Agama Islam di Universitas Pendidikan Indonesia sebagai upaya untuk membentuk mahasiswa muslim moderat?

2. Bagaimana rumusan konseptual internalisasi nilai toleransi dalam perkuliahan PAI di Perguruan Tinggi Umum sebagai upaya untuk membentuk mahasiswa muslim moderat?
3. Bagaimana implementasi konsep internalisasi nilai toleransi dalam perkuliahan PAI di Universitas Pendidikan Indonesia sebagai upaya untuk membentuk mahasiswa muslim moderat?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses internalisasi nilai toleransi melalui mata kuliah PAI di Perguruan Tinggi Umum. Adapun secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh gambaran tentang realitas internalisasi nilai toleransi melalui perkuliahan Pendidikan Agama Islam di Universitas Pendidikan Indonesia sebagai upaya untuk membentuk mahasiswa muslim moderat.
2. Menghasilkan rumusan (konsep) internalisasi nilai toleransi dalam perkuliahan PAI di Perguruan Tinggi Umum sebagai upaya untuk membentuk mahasiswa muslim moderat.
3. Menguji secara empirik konsep internalisasi nilai toleransi dalam perkuliahan PAI di Universitas Pendidikan Indonesia sebagai upaya untuk membentuk mahasiswa muslim moderat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat dari segi teori

Sampai saat ini, 'agama' secara sepihak dianggap sebagai sumber intoleransi. Disamping itu, pada level perguruan tinggi riset yang mengkaitkan agama dengan toleransi dilakukan baru sebatas studi evaluatif dampak perkuliahan agama terhadap sikap toleran mahasiswa. Berbeda dengan riset-riset sebelumnya, secara teoritik penelitian ini memformulasikan model hipotetik tentang internalisasi nilai toleransi melalui mata kuliah PAI di PTU.

1.4.2 Manfaat dari segi kebijakan

Secara konstitusional, dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan agama merupakan salah satu kurikulum wajib dalam setiap jenjang dan tingkat pendidikan

mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi. Akan tetapi, secara khusus di perguruan tinggi sampai saat ini, baik pihak kementerian riset dan pendidikan tinggi maupun kementerian agama belum melakukan pembinaan menyeluruh dan komprehensif terhadap penyelenggaraan PAI di PTU terutama terkait standar penyelenggaraan. Akibatnya, karena tidak ada standar, di lapangan ditemukan beragam penyelenggaraan PAI bahkan beberapa perguruan tinggi cenderung tidak terlalu mengindahkan kewajiban menyelenggarakan pendidikan agama karena menganggap tidak begitu penting.

Dari segi kebijakan, hasil riset ini mengingatkan kepada semua pihak terutama kementerian pendidikan dan kementerian agama untuk secara lebih serius membina penyelenggaraan PAI di PTU yang selama ini belum optimal. Kedua kementerian perlu bekerjasama untuk melahirkan keputusan bersama tentang standarisasi penyelenggaraan PAI di PTU. Pada prinsipnya PAI di PTU fokus pada memberikan pemahaman yang benar tentang agama, sehingga mahasiswa mampu menjadikan agamanya sebagai sumber nilai dalam kehidupannya sehari-hari, terutama dalam mempraktikkan nilai-nilai toleransi ketika menghadapi keragaman pemahaman Islam, ataupun menghadapi masyarakat yang terdiri dari multikultur baik level Indonesia atau masyarakat dunia pada umumnya.

1.4.3 Manfaat dari segi Praktik

Dari segi praktik, temuan penelitian menekankan akan pentingnya pembinaan terhadap pendidikan agama di PTU. Lebih jauh riset ini menggarisbawahi bahwa pendidikan agama, sebagai salah satu kurikulum wajib termasuk di perguruan tinggi, berpotensi sangat besar untuk menjadi salah satu sarana yang baik untuk internalisasi nilai. Salah satunya terkait internalisasi nilai toleransi terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam, khususnya keragaman pemahaman dan praktik Islam di Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dalam hal fiqih.

1.4.4 Manfaat dari segi Isu

Indonesia, sebagaimana kita ketahui bersama, merupakan bangsa yang heterogen. Dalam bangsa yang heterogen, toleransi adalah kunci untuk terciptanya

kerukunan. Karenanya, internalisasi nilai toleransi dalam kehidupan masyarakat yang heterogen seperti Indonesia merupakan suatu kemestian. Temuan penelitian, menunjukkan bahwa salah satu upaya internalisasi nilai toleransi bisa dilakukan melalui pendidikan agama.

1.5 Struktur Organisasi Disertasi

Disertasi ini akan disusun dalam lima bab. Secara garis besar uraian setiap bab berisi tentang:

1. Bab I sebagai bab pendahuluan terdiri dari lima sub bab, yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi disertasi.
2. Bab II berisi tinjauan literature yang akan mengkaji teori-teori yang mendasari penelitian ini. Setidaknya pada bab II ini akan diuraikan tentang: (a) pendidikan nilai dalam kontek Pendidikan Umum dan Karakter (PU dan K); (b) internalisasi nilai toleransi dalam konteks Pendidikan Umum dan Karakter, pendidikan agama, dan pendidikan Islam (c) Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi umum dalam konsep pendidikan umum dan karakter, pendidikan agama, pendidikan Islam, dan sistem pendidikan nasional; dan (d) muslim moderat sebagai salah satu tujuan PAI di Perguruan Tinggi Umum.
3. Bab III menguraikan tentang metode penelitian, yang meliputi desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data dan isu etik (pertimbangan etikal).
4. Bab IV adalah bab yang menguraikan tentang temuan penelitian dan pembahasan. Bab ini mendeskripsikan tentang temuan yang didapatkan dari penelitian di lapangan dan pembahasan hasil penelitian sesuai dengan konsep dan teori yang dirujuk tentang internalisasi nilai toleransi melalui mata kuliah PAI di Perguruan Tinggi Umum.
5. Bab V sebagai bab penutup akan menguraikan tentang kesimpulan dan rekomentasi. Kesimpulan akan memaparkan tentang uraian singkat tentang temuan-temuan penelitian, sementara rekomendasi menguraikan tentang implikasi dari hasil analisis kritis terhadap temuan penelitian yang melahirkan

solusi untuk memperbaiki dan meningkatkan optimalisasi praktik internalisasi nilai toleransi melalui mata kuliah PAI di Perguruan Tinggi Umum.